

## Analysis Of The Budget Realization Report (Lra) At The Sub-District Office Of Seberang Musi Kepahiang District

### Analisis Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Kantor Camat Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

Nella Indra Dewi Sijabat <sup>1)</sup>, Neri Susanti <sup>2)</sup>, Nenden Restu Hidayah <sup>3)</sup>

1) Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dehasen Bengkulu

2 Accounting Studies Faculty of Economics and Business, Dehasen University Bengkulu

Email: [nellaindradewisijabat@gmail.com](mailto:nellaindradewisijabat@gmail.com)

#### How to Cite :

Sijabat, D.I.N. Susanti.N.,Hidayah.R.N. (2023). Analysis Of The Budget Realization Report (Lra) At The Sub-District Office Of Seberang Musi Kepahiang District .JURNAL EMBA REVIEW, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v3i2>

#### ARTICLE HISTORY

Received [22 Oktober 2023]

Revised [30 November 2023]

Accepted [10 Desember 2023]

#### KEYWORDS

Budget Realization Report (LRA), Effectiveness, Efficiency, Performance

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan PAD dan efisiensi anggaran belanja Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam kinerja keuangan tahun 2021-2022 pada Kantor Camat Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Jenis Penelitian menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif, operasionalisasi penelitian menggunakan variabel rasio dalam menganalisis Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Camat Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, ada dua rasio yaitu rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi.. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan kinerja penerimaan PAD tidak efektif dengan presentase yaitu tahun 2021 sebesar 0% serta tahun 2022 sebesar 0% dan Anggaran Belanja kurang efisien dengan presentase tahun 2021 sebesar 98,32% serta tahun 2022 sebesar 94,46

#### ABSTRACT

The purpose of the study was to analyze the level of effectiveness of PAD revenue and the efficiency of the Budget Realization Report (LRA) expenditure budget in financial performance in 2021-2022 at the Head Office of Seberang Musi Sub-District, Kepahiang Regency. This type of research uses quantitative data and qualitative data, the operationalization of research uses ratio variables in analyzing the Budget Realization Report at the Head Office of Seberang Musi Sub-District, Kepahiang Regency, there are two ratios, namely the effectiveness ratio and the efficiency ratio. The method used is descriptive quantitative using effectiveness and efficiency ratios. The results of the research conducted show that the performance of PAD revenue is ineffective with a percentage, namely in 2021 of 0% and in 2022 of 0% and the Expenditure Budget is less efficient with a percentage in 2021 of 98.32% and in 2022 of 94.46.

## PENDAHULUAN

Dalam waktu yang singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sektor pemerintahan, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga-lembaga sector publik (Mardiasmo, 2018:1). Anggaran merupakan suatu perencanaan organisasi dalam merealisasikan kegiatannya. Anggaran perlu dibuat sebaik mungkin agar efektif dan efisien. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Fasha, 2023:1).

Pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang mengatur jalannya pemerintahan pada daerah tersebut, sebagai sektor publik pemerintah daerah harus menyediakan layanan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya termasuk pada pengelolaan keuangan daerah dan menggunakan hasil dari pengelolaan tersebut untuk memaksimalkan potensi yang ada dan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan

kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Rusdi, 2018:1). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya terdapat peraturan perundang-undangan. Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara maka perlu dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan negara dapat berjalan baik.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit. Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah. Kumpangpune et al (2019:65) menemukan kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap efektif dan efisien penggunaan anggaran keuangan. hal ini ditunjukkan bahwa semakin efektif dan efisien penggunaan anggaran dan belanja daerah maka kinerja keuangan daerah pun semakin tinggi peningkatan kinerjanya. Sedangkan penelitian yang lain menemukan bahwa kinerja pendapatan belum efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang dianggarkan. Adapun dengan kinerja belanja pada pemerintah daerah sudah efisien hal ini didukung dengan kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan. Sehingga pemerintah daerah harus melakukan penghematan dan melakukan peningkatan PAD dan disertai dengan penghematan belanja.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu instansi dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu instansi. Laporan Realisasi Anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para Pengguna Anggaran (PA) dalam membuat atau mengambil keputusan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan oleh pemerintah memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan instansi/daerah. LRA ini merupakan jenis laporan keuangan yang paling dahulu dibuat dan dihasilkan sebelum membuat laporan neraca, laporan operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kecamatan Seberang Musi merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang, yang terdiri dari 13 Desa. Kecamatan Seberang Musi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati menagani sebagian urusan Otonomi Daerah juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum, Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah ditingkat Kecamatan, Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta Kelurahan dan Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan. Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan. Serapan anggaran yang rendah dan belum optimal

karena kebutuhan masyarakat yang meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberikan perhatian kepada perkembangan PAD. Tidak terselenggaranya kemandirian daerah dikarenakan ketergantungan daerah terhadap dana transfer yang besar dari pusat. Untuk kesejahteraan masyarakat Kecamatan Seberang Musi sangat penting dalam efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan anggaran sebagai tolak ukur kinerja keuangan dari pertumbuhan pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Mengetahui keadaan keuangan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan program yang dijalankan dan realisasinya sesuai target anggaran dapat melihat catatan laporan realiasi anggaran (LRA).

## LANDASAN TEORI

### **Pengertian dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Biduri (2018:2) Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya yaitu pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan Yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Menurut Biduri (2018:2) Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Akuntansi Sektor Publik adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sudah menjadi tanggung jawab kepada pihak yang sudah memberikan Amanah. Akuntansi Sektor Publik merupakan suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis serta dalam pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik sehingga laporan pengelolaan keuangan ini nantinya dapat digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi

laporan pengelolaan keuangan pada pihak yang membutuhkan yang sangat membantu saat mengambil keputusan menurut Mardiasmo (2021:1). Jadi Akuntansi Sektor Publik merupakan sebuah entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan suatu usaha untuk menghasilkan barang serta pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan serta hak publik.

### **Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik**

Ruang lingkup akuntansi sebagai sektor publik tentu dapat dipastikan untuk lembaga sektor publik seperti berikut:

- 1.Lembaga tertinggi pemerintahan negara dan departemen di bawah.
- 2.Lembaga pemerintahan daerah.
- 3.Yayasan.
- 4.Partai politik dan LSM.

- 5.Organisasi non profit.
- 6.Sekolah.
- 7.Kesehatan.
- 8.Tempat peribadatan.
- 9.Perguruan tinggi.

Sederhananya ruang lingkup akuntansi sektor publik merupakan lembaga yang digunakan anggaran publik seperti yang sudah disebutkan di atas, itulah alasannya pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan anggaran masyarakat ini yang membuat lembaga-lembaga tersebut wajib melaporkan keuangan dalam sistem akuntansi ini.

### **Pengertian dan Fungsi Anggaran**

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran.

Ratag et al (2019:79) menyatakan anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Sedangkan penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai, masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan kedalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu.

### **Tujuan dan Proses Penyusunan Anggaran**

Wulandari et al (2022:818) penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan utama yaitu sebagai berikut:

- 1.Menyesuaikan rencana strategis.
- 2.Membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi.
- 3.Menugaskan tanggung jawab kepada manajer, untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka.
- 4.Memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer.

### **Pengertian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut, selain itu laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dona et al, (2020:137).

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

### **Manfaat, Tujuan dan Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan

dengan anggaranya. Informasi tersebut berguna/bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

### **Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan Daerah**

Fasha (2023:17) menyatakan laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau pada jangka waktu tertentu. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Fasha juga menyatakan tentang laporan keuangan daerah adalah: "Laporan pemerintah daerah yaitu suatu proses dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh beberapa pihak-pihak yang memerlukan". Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD-SKPD dan laporan keuangan PPKD yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

### **Maksud dan Tujuan Penyusunan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan disusun dan disajikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi bagi berbagai para pengguna. Informasi yang disajikan berupa posisi keuangan yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai keuangan, mengevaluasi kinerja suatu entitas dan oleh karena itu dibutuhkan laporan keuangan yang akuntabel.

Untuk merespon kebutuhan terhadap sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan kepada semua pihak maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut SAP, laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan serta dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai yang dapat mempengaruhi keputusan.

### **Pengertian Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (2022:1), Kinerja adalah keluaran atas hasil dari kegiatan dan program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Laporan kinerja keuangan atau disebut juga dengan laporan pendapatan dan biaya laporan surplus-rugi, laporan operasi, laporan surplus-defisit, atau laporan profit dan lost adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu (Rusdi, 2018:21-22).

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Analisis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2019:59) menyatakan bahwa analisis deskriptif kuantitatif adalah statistik yang

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Untuk melakukan analisis deskriptif kuantitatif digunakan rasio sebagai berikut:

**a.Rasio Efektivitas**

Untuk melihat tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD sumber hamid et al, (2019:35).

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: hamid et al, (2019:35)

**b.Rasio Efisiensi**

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total anggaran belanja Sumber : hamid et al, (2019:34).

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Total Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: hamid et al, (2019:34)

**Tabel 1 Format Analisis Perbandingan LK Berdasarkan Rasio**

Tahun	Target	Realisasi	Rasio	Ket
2021				
2022				

Sumber: Data Olahan

Dari laporan realisasi anggaran pada kantor Camat Seberang Musi Kabupaten Kepahiang maka hasil perhitungan analisis data tersebut yang diolah menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi maka penelitian ini dapat di Tarik kesimpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

**Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022**

Laporan realisasi anggaran dan laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Kantor Camat Seberang Musi tahun 2021- 2022 sesuai tabel 2, 3, 4 dan 5 berikut ini:

**Tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021**

No.Urut	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih (Kurang)
2.	<b>Belanja Daerah</b>	1.619.226.044,42	1.577.969.188,00	(41.256.856,42)
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	1.414.571.644,42	1.397.969.688,00	(16.601.956,42)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.414.571.644,42	1.397.969.688,00	(16.601.956,42)
2.2	<b>Belanja</b>	204.654.400,00	179.999.500,00	(24.654.900,00)

	Langsung			
2.2.1	Belanja Barang dan Jasa	197.154.400,00	172.499.500,00	(24.654.900,00)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
<b>Surplus / Defisit</b>		(1.619.226.044,42)	(1.577.969.188,00)	<b>41.256.856,42</b>
<b>(SILPA)</b>		(1.619.226.044,42)	(1.577.969.188,00)	<b>41.256.856,42</b>

Sumber: Kantor Camat Seberang Musi. Data diolah, 2023

**Tabel 3 LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021**

No.Urut	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)
5.	<b>Belanja Daerah</b>	1.619.226.044,42	1.577.969.188,00	97,45
5.1	<b>Belanja Operasi</b>	1.611.726.044,42	1.570.469.188,00	97,44
5.1.1	Belanja Pegawai	1.414.571.644,42	1.397.969.688,00	98,83
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	197.154.400,00	172.499.500,00	87,49
5.2	<b>Belanja Modal</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
<b>Surplus / Defisit</b>		(1.619.226.044,42)	(1.577.969.188,00)	<b>97,45</b>
<b>(SILPA)</b>		(1.619.226.044,42)	(1.577.969.188,00)	<b>97,45</b>

Sumber: Kantor Camat Seberang Musi. Data diolah, 2023

**Tabel 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022**

No. Urut	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih (Kurang)
2.	<b>Belanja Daerah</b>	2.046.443.438,00	1.932.999.120,00	(113.444.318,00)
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	1.903.152.238,00	1.789.707.920,00	(113.444.318,00)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.903.152.238,00	1.789.707.920,00	(113.444.318,00)
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	143.291.200,00	143.291.200,00	0,00
2.2.1	Belanja Barang dan Jasa	123.765.200,00	123.765.200,00	0,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.526.000,00	19.526.000,00	0,00
<b>Surplus / Defisit</b>		(2.046.443.438,00)	(1.932.999.120,00)	<b>113.444.318,00</b>
<b>(SILPA)</b>		(2.046.443.438,00)	(1.932.999.120,00)	<b>114.444.318,00</b>

Sumber: Kantor Camat Seberang Musi. Data diolah, 2023



Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Rasio (%)	Keterangan Efektivitas
2021	0,-	0,-	0,-	Tidak Efektif
2022	0,-	0,-	0,-	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2023

Dapat dilihat dari tabel 11 maka laporan realisasi anggaran penerimaan PAD Kantor Camat Seberang Musi Tahun 2021-2022 dapat disimpulkan bahwa nilai presentase laporan realisasi anggaran penerimaan PAD sebesar 0% sehingga menjadi tidak efektif dikarenakan:

a. Tahun 2021

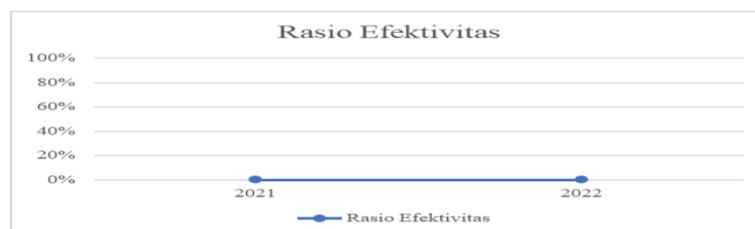
Berdasarkan hasil Rasio Efektivitas penerimaan PAD Kantor Camat Seberang Musi Tahun 2021 pada tabel 11 dapat diketahui bahwa rasio efektivitas sebesar 0% hal ini mengidentifikasi bahwa kinerja Kantor Camat Seberang Musi tidak efektif, karena kriteria efektivitas penerimaan PAD  $\leq 60\%$  sehingga dikatakan tidak efektif.

b. Tahun 2022

Berdasarkan hasil Rasio Efektivitas penerimaan PAD Kantor Camat Seberang Musi Tahun 2022 pada tabel 11 dapat diketahui bahwa rasio efektivitas sebesar 0% hal ini mengidentifikasi bahwa kinerja Kantor Camat Seberang Musi tidak efektif, karena kriteria efektivitas penerimaan PAD  $\leq 60\%$  sehingga dikatakan tidak efektif.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa rasio efektivitas penerimaan PAD Kantor Camat Seberang Musi pada Tahun 2021-2022 yang memiliki nilai presentase sebesar 0% sehingga dapat dinilai tidak efektif dalam melakukan pengelolaan anggaran, Semakin rendah presentase tingkat rasio efektivitas semakin tidak baik tingkat efektifnya. Dapat dilihat pada gambar 3 yang menjelaskan grafik rasio efektivitas penerimaan PAD Kantor Camat Seberang Musi di bawah ini:

**Gambar 1 Grafik Rasio Efektivitas**



Sumber: Data diolah, 2023

### Rasio Efisiensi Anggaran Belanja

Rasio efisiensi menggambarkan kemampuan Kantor Camat Seberang Musi dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang diterapkan berdasarkan potensi riil Kantor Camat Seberang Musi. Kemampuan Kantor Camat Seberang Musi dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal sebesar kurang atau sama dengan 60%. Dengan demikian semakin rendah efisien maka kemampuan kinerja Kantor Camat Seberang Musi semakin baik. Berikut ini merupakan data Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun 2021-2022 pada Kantor Camat Seberang Musi dapat dilihat pada tabel 12 serta dapat dihitung menggunakan rasio efisiensi pada tabel 13 di bawah ini:

**Tabel 8 Target Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja**

Tahun	Anggaran Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)
2021	1.604.846.044,-	1.577.969.188,-
2022	2.046.443.438,-	1.932.999.120,-

Sumber: Kantor Camat Seberang Musi. Data diolah, 2023

Hasil tabel 12 target Anggaran Belanja tahun 2021 sebesar Rp.1.604.846.044,- dan realisasinya lebih rendah dari target, realisasi belanja yaitu sebesar Rp.1.577.969.188,- Tahun 2021 target Anggaran Belanja sebesar Rp.2.046.443.438,- dan realisasinya lebih rendah dari target, realisasi belanja yaitu sebesar Rp.1.932.999.120,-.

**Tabel 9 Rasio Efisiensi Anggaran Belanja.**

□	□	□	□ 100%
---	---	---	--------

Sumber: hamid et al, (2019:35)

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.577.969.188, -}{1.604.846.044, -} \times 100\% = 98,32\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{1.932.999.120, -}{2.046.443.438, -} \times 100\% = 94,46\%$$

Menurut perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi anggaran belanja tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 14 di bawah ini:

**Tabel 10 Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Kecamatan Seberang Musi**

Tahun	Anggaran Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	Rasio (%)	Keterangan Efisiensi
2021	1.604.846.044,-	1.577.969.188,-	98,32	Kurang Efisien
2022	2.046.443.438,-	1.932.999.120,-	94,46	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah, 2023

Dapat dilihat dari tabel 14 maka Laporan Realisasi Anggaran belanja Kantor Camat Seberang Musi Tahun 2021-2022 dapat disimpulkan bahwa nilai presentase Laporan Realisasi Anggaran belanja sebesar 96,39% sehingga kurang efisien dikarenakan:

a. Tahun 2021

Berdasarkan hasil Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Kantor Camat Seberang Musi Tahun 2021 pada tabel 14 dapat diketahui bahwa rasio efisiensi sebesar 98,32% hal ini mengidentifikasi bahwa kinerja Kantor Camat Seberang Musi kurang efisien, karena kriteria efisiensi anggaran belanja 90% - 100% sehingga dikatakan kurang efisien.

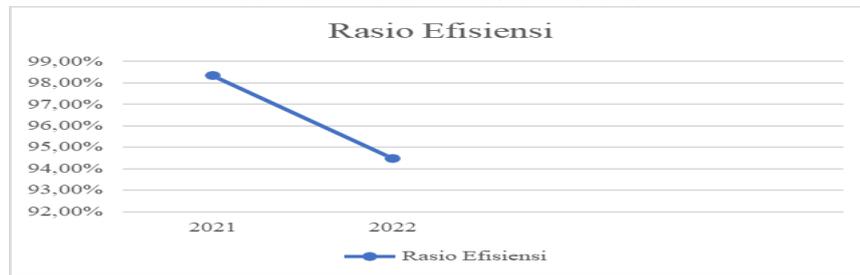
b. Tahun 2022

Berdasarkan hasil Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Kantor Camat Seberang Musi Tahun 2022 pada tabel 14 dapat diketahui bahwa rasio efisiensi sebesar 94,46% mengalami penurunan sedikit dari tahun sebelumnya. Hal ini mengidentifikasi bahwa kinerja Kantor Camat Seberang Musi kurang efisien, karena kriteria efisiensi anggaran belanja 90% - 100% sehingga dikatakan kurang efisien.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa rasio efisiensi Anggaran Belanja Kantor Camat Seberang Musi memiliki rata-rata nilai persentase sebesar 96,39% sehingga dapat dinilai kurang efisien dalam melakukan pengelolaan anggaran. Semakin rendah presentase tingkat rasio efisiensi

maka semakin baik tingkat efisiensinya. Dapat dilihat pada gambar 4 yang menjelaskan grafik rasio efisiensi anggaran belanja Kantor Camat Seberang Musi di bawah ini:

**Gambar 2 Grafik Rasio Efisiensi**



Sumber: Data diolah, 2023

Penilaian kinerja keuangan pada Kantor Camat Seberang Musi berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi tahun 2021-2022 menunjukkan hasil kinerja yang tidak efektif berdasarkan tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD dan menunjukkan hasil kinerja yang kurang efisien berdasarkan tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja. Hasil analisis efektivitas penerimaan PAD dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan atau tetap sama dengan presentase 2021 0% serta tahun 2022 0% dikarenakan belum adanya penerimaan PAD pada Kantor Camat Seberang Musi sehingga kemampuan satuan kerja tidak efektif. Kantor Camat Seberang Musi harus mengatur strategi dan inovasi untuk membuat peluang yang menghasilkan penerimaan PAD agar kinerja keuangan Kantor Camat Seberang Musi menjadi efektif jangan hanya mengandalkan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

Hasil analisis efisiensi anggaran belanja dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaitu dengan presentase tahun 2021 98,32% serta tahun 2022 94,46%. Hal ini disebabkan belanja barang dan jasa diminimalkan karena Kantor Camat Seberang Musi tidak memiliki penerimaan PAD dan hanya menggunakan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan adanya penghematan penggunaan anggaran belanja Kantor Camat Seberang Musi setiap tahunnya maka pemerintah Kabupaten melakukan pemangkasan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan berbeda-beda. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan semakin baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

#### 1. Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Kantor Camat Seberang Musi

Tingkat dan kriteria Efektivitas Penerimaan PAD pada Kantor Camat Seberang Musi Tahun 2021-2022 tidak efektif menunjukkan kinerja yang tidak baik karena memiliki rata-rata presentase sebesar 0% dari rata-rata jumlah rasio tahun 2020 sebesar 0% ditambah tahun 2021 sebesar 0%. Hal ini disebabkan Kantor Camat Seberang Musi belum ada penerimaan PAD sama sekali.

#### 2. Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Kantor Camat Seberang Musi

Tingkat dan kriteria Efisiensi Anggaran Belanja pada Kantor Camat Seberang Musi Tahun 2021-2022 kurang efisien menunjukkan kinerja yang kurang baik karena memiliki rata-rata presentase sebesar 96,39% dari rata-rata jumlah rasio tahun 2021 sebesar 98,32% ditambah tahun 2022 sebesar 94,46%. Hal ini disebabkan Kantor Camat Seberang Musi belum memiliki penerimaan PAD hanya masih menggunakan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Untuk mengefisienkan atau menghemat anggaran belanja maka pemerintah.

### Saran

1. Kantor Camat Seberang Musi diharapkan untuk membuat atau mencari potensi yang ada di Kecamatan Seberang Musi supaya PAD Kecamatan Seberang Musi dari yang tidak ada menjadi

ada jangan hanya mengarpakan transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat, selain itu Kantor Camat Seberang Musi dapat meningkatkan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan program-program kegiatan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan tingkat Efektivitas pada tahun yang akan datang guna tercapainya kriteria yang di targetkan.

2. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah rasio-rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja Pemerintah Kecamatan Seberang Musi contohnya analisis varians pendapatan dan analisis varians anggaran belanja. Disarankan juga untuk menambah tahun penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamid Abdul dan Ilyas Lamuda, 2019. Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money. *Gorontalo Accounting Journal* , 2 (1), 33-35.
- Biduri, Sarwenda 2018. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Pertama. Umsida Press.Jawa Timur.
- Desi Wulandari. Roslinda Harahap dan Putri Aulia Siregar. 2022. Analisis Penyusunan Anggaran Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4 (6), 818.
- Eka Miliya Dona dan Verza Ayu Lestari. 2020. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kabtor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* , 5 (2), 137.
- Mahsun, Mohammad 2018. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi pertama BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2021. Akuntansi Sektor Publik. CV. Media Sains Indonesia. Bandung.
- Novi Kumpangpune. David P. E dan Daisy S. M Engka. 2019. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20 (3), 65.
- Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Rifky Nur Fasha. 2023. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda. Skripsi. Uiversitas Mulawarman Samarinda.
- Riska Franita. Purwo Siswoyo. Hidayati Purnama Lubis dan Khairin Nisa Lubis. 2023 Juni. Anggaran Produk Inovasi di Kawasan Al-Amin Science Idustrial Park (Livin Lab) Glugur Rimbun Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru Tahta Media Grup, 2-3.
- Rusdi. 2018. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.CV. Bandung.
- Wieske Annellen Ratag. Aderson G. Kunenaung dan Daisy S. M Engka. 2019. Pengaruh Perencanaan Anggaran di Lingkungan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20 (3), 79.